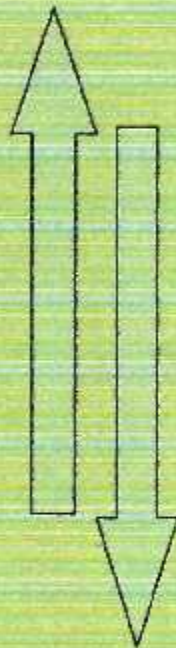




**REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2016-2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2019**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah serangkaian kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, rencana disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik skala nasional, regional maupun lokal dengan melakukan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) termasuk peluang dan kecendrungan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam Peraturan Pemerintah ini memuat tentang tatacara revisi pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat kabupaten.

Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Komitmen dari segenap jajaran organisasi dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon terhadap perubahan lingkungan. Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi dimaksud mencakup berbagai upaya atau langkah yang dirancang agar tercapai tujuan dan sasaran.

Strategi tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan sepanjang tahun. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas



pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar terciptanya akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.

Dokumen revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat revisi dari dokumen Renstra awal untuk periode 4 (empat) tahun kedepan. Revisi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami revisi.

Proses penyusunan revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2018 dilakukan melalui tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan revisi Renstra Badan Kesbangpol
- b. Penyusunan rancangan revisi Renstra Badan Kesbangpol
- c. Penyusunan rancangan akhir revisi Renstra Badan Kesbangpol
- d. Penetapan revisi Renstra Badan Kesbangpol

Penyusunan revisi ini dilakukan oleh tim penyusunan Renstra yang beranggotakan beberapa pejabat struktural dan staf di lingkungan sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 menyelaraskan dengan dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Revisi Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum lingkup Kementerian Dalam Negeri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum proses dan prosedur tentang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis serta dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan dokumen Renstra ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2004 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 Tanggal 28 Desember 2016.
21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;



22. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah, Nomor 70/KPTS/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 - 2021 Tanggal 27 Januari 2017.-

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah adalah menyediakan dokumen urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah. Serta sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi misi dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah sampai kurun waktu 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016–2021 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah sampai akhir periode Renstra pada tahun 2021.
2. Menetapkan strategi, kebijakan, program serta kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, dan
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016-2021 terdiri dari :



- BAB I. PENDAHULUAN**, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS**, menguraikan gambaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terkait tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan ke depan.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, melakukan telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah terhadap renstra K/L dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, telaah RTRW dan KHLS, serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**, menjabarkan tujuan dan sasaran guna pencapaian visi dan misi tersebut dan dalam rangka untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam lima tahun mendatang.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** menjabarkan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Landasan kerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2012 dan Nomor 03 Tahun 2016 setelah disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan masih tetap melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Setiap komponen dalam susunan organisasi yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis merupakan satu kesatuan yang sinergis untuk mewujudkan misi dan visi yang telah dirumuskan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi yang dibagi habis pada setiap komponen yang ada secara berjenjang.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
4. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Bidang Politik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi, Partai Politik dan Pemilu

A. Kepala Badan, mempunyai tugas:

1. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
2. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.



3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris, mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan tata usaha.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
5. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

C. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dan melaksanakan penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan pengembangan kebangsaan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.



- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

D. Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan model penguatan ketahanan sebutkami di daerah, dan menciptakan situasi dan kondisi daerah yang kondusif dengan memberikan pelayanan serta melakukan klasifikasi potensi-potensi konflik dan istimasi yang harus dilaksanakan serta melakukan identifikasi, koordinasi dan konsultasi dini penanganan konflik yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepala Bidang PKK Sebutkami mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan penyiapan program di bidang PKK Sebutkami di daerah.
2. Penyusunan rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan PKK Sebutkami di daerah.
3. Melaksanakan fasilitas PKK Sebutkami di daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan konflik dalam masyarakat.
5. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang PKK Sebutkami.
 - a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Politik, mempunyai tugas pokok menghimpun data , menyiapkan bahan, mengkoordinasikan tugas dalam rangka penyusunan program dan fasilitas penyelenggaraan/pelaksanaan PEMILU serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan partai politik.

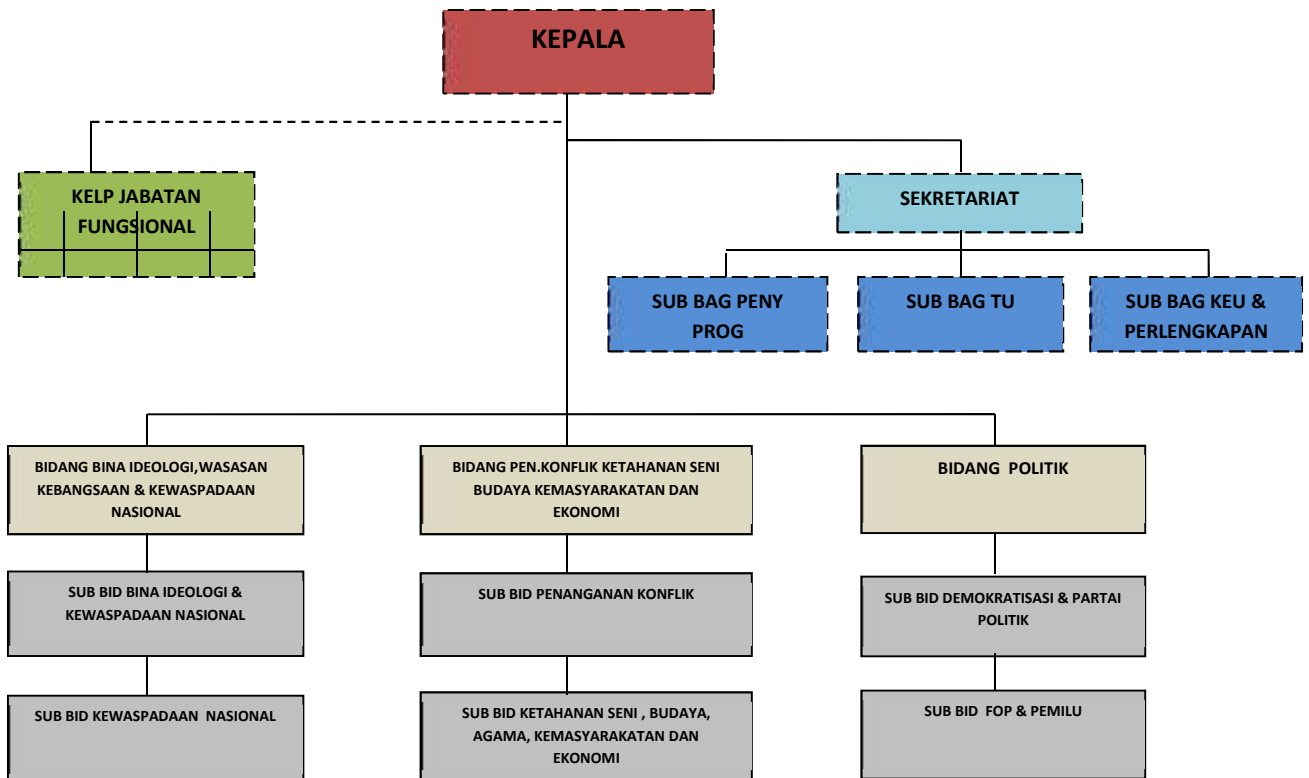
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Politik juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan politik.
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang hubungan partai politik.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang hubungan partai politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan bidang tugasnya



Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu berdasarkan Pasal 12 Perda Nomor 2 Tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan. Secara umum dapat digambarkan bahwa Badan Kesbang dan Politik merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati/Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Selanjutnya secara rinci dipaparkan tugas pokok dan fungsi setiap komponen dalam susunan organisasi yang digambarkan di atas.



2.2 Sumber Daya Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh 40 orang Pegawai terdiri dari 37 orang PNS, 2 orang non PNS (K2) dan 1 orang Tenaga Akuntansi seperti yang tercantum pada Tabel dibawah ini.

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

No	J a b a t a n	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Subbagian	3
5	Kepala Subbidang	6
6	Staf Sekretariat	7
8	Staf Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	4
9	Staf Bidang Politik	4
10	Staf Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	8
11	Honorar K2	2
12	Tenaga Akuntan	1
	J u m l a h	40

Berdasarkan pendidikan dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	9
2	Strata 1	13
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	13
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2
Jumlah		37

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut :

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	22
3	Golongan II	5
4	Golongan I	2
Jumlah		37



Guna mendukung program dan kegiatan yang ada didukung oleh pejabat yang berkompoten, dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan Eselon**

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	9
4.	Staf	23
	Jumlah	37



2.2.2 Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Daftar sarana dan prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian Nama Barang	Jumlah
I	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	520
I.	Alat-alat Angkutan	20
1.	Sedan	3
2.	Station Wagon	4
3.	Pick Up	1
4.	Sepeda Motor	12
II	Alat Kantor dan Rumah Tangga	457
1.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	5
2.	Mesin Ketik Elektronik	4
3.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa double folio	5
4.	Lemari Besi	1
5.	Filling Besi/Metal	28
6.	Brankas	2
7.	Lemari Kaca	11
8.	Lemari Kayu	7
9.	Papan Visual	1
10.	Alat Penghancur Kertas	10



No	Uraian Nama Barang	Jumlah
11.	White Board	3
12.	Overhead Projektor/Infocus	2
13.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1
14.	Genset	2
15.	Lemari Kayu	4
16.	Meja Rapat	59
17.	Meja Tambahan	1
18.	Kursi Rapat	29
19.	Kursi Tamu	4
20.	Kursi Tangan	30
21.	Kursi Putar	47
22.	Meja Komputer	10
23.	Meja Biro	46
24.	Mebeleur Lainnya	1
25.	Jam Mekanis	7
26.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1
27.	Mesin Potong Rambut	1
28.	Lemari Es	1
29.	AC Unit	14
30.	AC Split	3
31.	TekoListrik	2
32.	Televisi	10
33.	Loudspeaker	1
34.	Sound System	1



No	Uraian Nama Barang	Jumlah
35.	Wireless	1
36.	Dispenser	5
37.	Mimbar/Podium	1
38.	Handy Cam	1
39.	Alat Rumah Tangga Lainnya	7
40.	PC Unit/Komputer PC	22
41.	Laptop	15
42.	Printer	32
43.	CPU	2
44.	Monitor	4
45.	Keyboard	2
46.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
47.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
48.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
49.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13
50.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
51.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
52.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	16
53.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
III	Alat Studio dan Alat Komunikasi	15
1.	Microphone/Wireless Mic	1
2.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
3.	Tripod Screen	1



No	Uraian Nama Barang	Jumlah
4.	Wall Screen	1
5.	Camera Electronic	3
6.	Photo Tustel	1
7.	Faxsimile	2
8.	Antena SHF/Parabola Portable	1
9.	Mas Tower	1
10.	Switcher/Menara Antena Lain-lain	2
IV	Alat Laboratorium	26
1.	Meja Kerja	19
2.	Papan Alfabeta	1
3.	Lampu Pijar	5
4.	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1
V	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	5
1.	CCTV	5

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

Kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :



Kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu

No	Bidang	Ruang Lingkup
(1)	(2)	(3)
1	Politik	Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten/Kecamatan
2	Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional	Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, Bela Negara, pemantauan orang asing, pekat skala Kabupaten / Kecamatan
3	Penanganan Konflik, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	Penanganan konflik sosial, kebijakan dan ketahanan masyarakat, organisasi kemasyarakatan skala Kabupaten/Kecamatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu adalah SKPD yang menyelenggarakan pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta tugas-tugas lain yang berikan Bupati. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu selama 5 (lima) terakhir dalam Pemantauan Masalah Strategis, Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu selama 5 (lima) tahun terakhir telah



melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik. Karena pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi di negara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan disetiap aspek kehidupan masyarakat dan desa.

Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada. Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional mencakup : penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, pembinaan kerukunan umat beragama serta pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pembinaan dan penguatan peran LSM/Orkemas setiap tahun dilaksanakan melihat dengan semakin bertambahnya jumlah LSM/Orkemas yang terbentuk di Kabupaten Bengkalis. Adapun bentuk pembinaan terhadap LSM/Orkemas yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fungsionaris parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat
2. Pembinaan Ormas dan LSM di Kabupaten Bengkalis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan LSM dan Ormas
3. Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas.



Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan yang Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011–2015

No	Tahun	LSM	Jumlah
1	2011	412	412
2	2012	168	168
3	2013	22	22
4	2014	26	26
5	2015	14	14

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap penyakit masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai minuman keras dan narkoba. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat-rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah LSM yang dibina	Jumlah	546	Terlaksananya pembiayaan kepada LSM	300	350	300	250	200	412	168	22	26	14	137	48	7,3	10,4	7



2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah	0	Terwujudnya bentuk kegiatan pembinaan kepada masyarakat	235	360	475	680	825	0	50	0	266	2	0	13,8	0	39	0
3	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah	364	Terwujudnya pendidikan politik masyarakat	0	1302	1706	1726	1774	0	225	1200	2120	0	0	17	70,3	122,8	0
4	Jumlah Demo	Jumlah	4	Menu runya potensi konflik	3	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan masa Renstra Tahun 2011-2015, indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik dapat tercapai terhadap indikator :

1. Jumlah LSM yang dibina dengan target 300 pada tahun 2011, terealisasi sebanyak 412 LSM yang dilakukan pembinaan. Hal ini tentu saja telah melebihi dari target awal indikator dengan kesimpulan bahwa pada indikator kinerja ini pelayanan tercapai maksimal. Hal ini disebabkan keseriusan aparat Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi tentang Ketentuan dan Peraturan tentang ORMAS.
2. Kegiatan pembinaan politik daerah dengan target 1774 pada tahun 2015, terealisasi sebanyak 2120 jumlah pembinaan pendidikan politik. Hal ini juga melebihi dari target awal indikator, kesimpulannya indikator kinerja ini tercapai maksimal. Hal ini juga disebabkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu.
3. Indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2011 dan 2013 tidak terealisasi disebabkan anggaran untuk kegiatan dimaksud tidak tersedia.
4. Indikator kinerja jumlah demo sesuai target pada tahun 2011 s/d 2015, realisasinya tidak ada sama sekali mengingat kegiatan demo bersifat situasional.



TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,233,564,950	1,225,027,321	1,214,268,320	1,161,876,000	1,497,743,600	1,074,902,199	798,796,741	885,281,199	1,080,464,727	1,331,728,111	87.14	65.21	72.91	92.99	88.92
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	610,521,190	714,197,000	1,006,227,345	479,645,000	642,590,000	340,130,127	615,537,157	534,751,127	460,303,649	617,443,080	55.71	86.19	53.14	95.97	96.09
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	121,235,000	112,675,000	75,350,000	0	81,400,000	54,250,000	112,075,000	54,250,000	0	79,110,000	44.75	0.00	72.00	0.00	97.19
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114,320,000	250,000,000	150,000,000	50,000,000	75,000,000	140,783,000	177,345,900	140,783,000	49,820,000	66,083,000	123.15	70.94	93.86	99.64	88.11
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	650,224,000	593,069,200	0	0	298,930,200	0	585,714,200	0	0	165,879,000	0.00	0.00	0.00	0.00	55.49
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	65,885,025	144,628,984	148,750,900	527,290,648	366,088,300	100,820,900	140,128,984	100,820,900	368,255,848	309,973,800	153.03	96.89	67.78	69.84	84.67
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	225,376,749	462,057,800	0	175,306,500	209,546,500	149,011,757	209,546,500	0	135,696,544	0.00	66.12	45.35	0.00	77.41
8	Program pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	48,106,000	327,098,058	995,311,800	970,263,500	1,524,816,500	567,878,476	231,987,549	567,878,476	660,353,700	951,412,100	1,180.47	70.92	57.06	68.06	62.40
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	0	2,543,661,967	660,314,200	432,430,000	348,323,200	447,008,200	1,918,551,643	447,008,200	370,969,500	282,813,000	0.00	75.42	67.70	85.79	81.19



Revisi Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021

10	Prrogram Pendidikan Politik Masyarakat	264,438,400	1,516,760,871	947,629,390	2,351,217,023	2,287,416,702	890,115,374	618,012,877	890,115,374	1,496,265,375	1,775,740,352	336.61	40.75	93.93	63.64	77.63
11	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	102,765,300	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Per tahun	3,211,059,865	7,652,495,150	5,659,909,755	5,972,722,171	7,297,615,002	3,925,434,776	5,347,161,808	3,830,434,776	4,486,432,799	5,715,878,987	1,180.47	96.89	0.00	0.00	97
	Total Per Lima Tahun					29,793,801,943					23,305,343,146			1,180.47		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, seiring dengan dinamika serta perubahan lingkungan strategis mengharuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk lebih responsif terhadap perubahan tersebut, baik perubahan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi. Dengan demikian perubahan yang merupakan tantangan dihadapi dengan berbagai upaya dalam rangka untuk terwujudnya perbaikan secara terus menerus guna tercapainya pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi antara lain adalah :

1. Masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta peredaran miras.
2. Belum efektifnya kelembagaan politik dalam memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka membangun etika dan moral politik masyarakat.
4. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai ideologi Pancasila dan kesadaran berperilaku berwawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari pengaruh perbatasan dengan luar negeri.
5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
6. Masih signifikannya kesenjangan antar Kecamatan sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
7. Masih lemahnya ketahanan budaya, kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi, sehingga peran FKUB belum optimal.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai aset pembangunan nasional.
4. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai asset budaya nasional.
5. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan.
6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.
7. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
8. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.
9. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejolak konflik.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat majemuk mempunyai kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang mengarah kepada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal yang melatar belakangi permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional. Kondisi kemajemukan ini juga terdapat di Kabupaten Bengkalis.

Kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya pendidikan politik, wawasan kebangsaan menjaga keamanan dan ketertiban dan lain sebagainya memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Beberapa kecenderungan serta perkembangan situasi dan ancaman bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan permasalahan di daerah yang mengarah pada terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa dan instabilitas daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum mantapnya pemahaman masyarakat terhadap ideolog Pancasila
2. Belum mantapnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
3. Belum mantapnya proses pembauran dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya potensi konflik



5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya.
6. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.
7. Kondisi letak geografis yang terdiri dari pulau dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia serta berada ditepi alur pelayaran internasional, selat Malaka menimbulkan kerawanan bagi masuknya pengaruh asing dan peredaran gelap narkoba.
8. Belum optimalnya peran Organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan
9. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam upaya mencapai visi dan misi serta tujuan strategis, maka perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kelemahan dan kekuatan yang akan dianalisis meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Analisis Lingkungan

1. Nilai-nilai (*values*) atau kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sebuah organisasi pembelajaran bagi semua anggotanya adalah :
 - 1) Kebersamaan,
 - 2) Tanggung jawab,
 - 3) Responsif dan
 - 4) Inovatif



2. Identifikasi Faktor-Faktor Lingkungan Strategik

a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)

Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dilakukan melalui pencermatan (*scanning*) lingkungan internal organisasi yang menghasilkan :

1) Kekuatan (Strengths) :

- a) Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b) Tersedia pejabat struktural dan pegawai pelaksana

2) Kelemahan (Weaknes) :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terbatasnya sarana dan prasarana.
3. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur.
4. Terbatasnya pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)

Pencermatan Lingkungan Eksternal dilakukan melalui pencermatan (*scanning*) lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan :

1) Peluang (Opportunities) :

- a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan ketahanan nasional
- e). Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, instansi vertikal, forum dan organisasi kemasyarakatan.



2) Tantangan (Threats) :

- a) Letak dan Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis (sebahagian terletak di wilayah Kepulauan dan perairan ditepi Selat Malaka merupakan alur pelayaran Internasional berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, dan sebahagian wilayahnya terletak di daratan alur lalu lintas Pulau Sumatera) memiliki potensi kerawanan gangguan kamtibmas masuknya ideologi asing, paham radikalisme dan aksi terorisme, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus diwaspadai dan Era Globalisasi, kemajuan Teknologi informatika dan ketimpangan ekonomi, kemiskinan memiliki potensi kerawanan timbulnya konflik di masyarakat dan melemahkan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c). Tuntutan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem politik yang demokratis.

Dari analisis lingkungan stratejik internal dan eksternal tersebut dapat dibuat pembobotan untuk mencapai faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

PERUMUSAN KESIMPULAN ANALISA FAKTOR INTERNAL (KAFI) MELALUI PEMBOBOTAN
PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL (PLI)

PLI	Bobot	Rating	Bobot & Rating	Score/ranking
<u>Kekuatan</u> : (Strengths)				
a). Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.	19	4	76	I
b). Tersedianya pagu anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.	14	4	56	II
KELEMAHAN : (WEAKNESSES)				
a) Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur	19	4	76	I
b) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.	18	4	72	II
c) Terbatasnya sarana dan prasarana.	17	4	68	III
d) Terbatasnya pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.	13	4	52	IV
Total	100	-	-	-



Tabel 3.2

PERUMUSAN KESIMPULAN ANALISA FAKTOR EKSTERNAL (KAFE) MELALUI PEMBOBOTAN PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL (PLE)

PLE	Bobot	Rating	Bobot & Rating	Score
<u>Peluang : (Opportunities)</u>				
a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. kewaspadaan dan Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.	29	4	116	I
b). Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, instansi vertikal, dan forum dan organisasi kemasyarakatan	20	4	80	II
<u>Tantangan : (Threats)</u>				
a). Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Selatan, Era Globalisasi, kemajuan Teknologi informatika..	28	4	102	I
e). Tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem Politik yang demokratis.	27	4	108	II
Total	100	-	-	-

Keterangan :

Untuk memudahkan pemahaman, maka kami memberi nilai Rating sebagai berikut :

R (4) : Sangat berpengaruh, R (3) : Cukup berpengaruh, R (2) : Berpengaruh, R (1) : Kurang berpengaruh



c. Kesimpulan Analisis Faktor Internal / Eksternal:

Dari hasil pembobotan faktor lingkungan stratejik tersebut, maka diambil beberapa faktor prioritas sebagai berikut :

1) Kekuatan (Internal) :

- a). Tersedianya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b). Tersedianya pagu anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

2) Kelemahan (internal) :

- a). Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b). Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
- c). Terbatasnya sarana dan prasarana.

3) Peluang

- a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
- b) Adanya Kebijakan nasional dan daerah serta Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang Kewaspadaan Nasional.
- c). Adanya Kebijakan nasional dan daerah serta Peraturan Peraturan Perundang-undangan tentang dan ketahanan nasional
- e). Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, instansi vertikal, dan forum dan organisasi kemasyarakatan.

4) Tantangan :

- a). Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Selatan, memiliki potensi kerawanan terhadap wawasan kebangsaan masuknya pengaruh



Ideologi asing, paham radikalisme dan aksi terorisme, kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang harus diwaspadai.

- b. Era Globalisasi dan kemajuan Teknologi informatika memiliki kerawanan terhadap ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- c. Tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem Politik dalam negeri yang demokratis.

3. Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP) dan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

a. Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP)

Setelah melakukan pembobotan dan menarik kesimpulan analisis faktor internal/eksternal selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk memperoleh analisis strategi alternatif pilihan (ASAP) : SO, ST, WO, WT. Analisis disusun kedalam matrik dibawah ini dengan mengkaitkan faktor internal dan eksternal sebagai berikut :



Tabel 3.3

ANALISIS SWOT

INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	a) Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan.	1. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran 3. Terbatasnya sarana dan prasarana
EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES) :	STRATEGI WO
a). Adanya Kebijakan nasional, daerah dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan pelayanan Publik.	STRATEGI SO	STRATEGI WO
TANTANGAN (THREATS)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Selatan dan Era Globalisasi dan kemajuan Teknologi informatika. 2. Tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sistem Politik dalam negeri yang demokratis.	1. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi 2. Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran



Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP) :

STRATEGI SO :

- ✓ Implementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

STRATEGI ST :

- ✓ Tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
- ✓ Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.

STRATEGI WO :

- ✓ Tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

STRATEGI WT :

- ✓ Tingkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

b. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Selanjutnya dari strategi SO, ST, WO dan WT dapat dijadikan sebagai faktor kunci keberhasilan diurutkan prioritasnya dengan keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai sebagai berikut :



Tabel 3.4

Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi dan Nilai

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN										Uru-tan
	VISI	MISI				NILAI-NILAI				FKK	
	1	1	2	3	4	1	2	3	4		
A, STRATEGI SO											
Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32 (I)	
B. <u>STRATEGI WO</u> :											
1. Tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.	4	4	4	4	4	3	3	3	2	31 (II)	
2. Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.	4	4	4	4	4	3	3	2	2	27 (II)	
C. <u>STRATEGI ST</u> :											
Tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26 (V)	
D. <u>STRATEGI WT</u> :											
1. Tingkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran	3	3	3	3	3	3	3	2	2	25 (IV) 21 (VIII)	



Berdasarkan hasil analisis SWOT dan urutan prioritas strategi utama, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Tingkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- 2) Tingkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- 3) Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
- 4) Tingkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 5) Tingkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

4. Rencana Strategis : Tujuan Sasaran dan Strategi

1. Tujuan

Dalam rangka mencapai misi yang telah dikemukakan di atas dengan mempertimbangkan hasil FKK, disusun Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
3. Meningkatkan Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

2. Sasaran

Atas dasar tujuan, ditentukan Sasaran, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Terwujudnya kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
3. Terwujudnya Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.



4. Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur.
5. Terwujudnya kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

3. Strategi

Setelah menentukan apa yang akan dicapai dan kapan, maka langkah berikutnya adalah menetapkan cara bagaimana akan mencapainya maka disusun Strategi yang mencakup Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dalam penyusunan usulan Renstra ini, Strategi dibatasi hanya sampai penetapan Program saja.

a. Kebijakan

1. Meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
3. Meningkatkan Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran

b. Program

1. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Kewaspadaan dan ketahanan seni, budaya, agama, masyarakat dan ekonomi.
3. Fasilitasi dan dukungan terwujudnya sistem politik yang demokratis.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan kualitas Pelayanan administrasi perkantoran



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL
NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”**

Tabel 3.5
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan RPJMD 2016-2021

Misi (1)	Tujuan	Sasaran	Urusan	SKPD
1	2	3	4	5
Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas	1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2.Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah	1.Meningkatnya pelayanan publik 2.Meningkatnya keselarasan pembangunan	Fungsi penunjang lainnya - Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis



Tabel 3.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas</p> <p>Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat</p> <p>2. Masih adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras</p>	<p>1. Kurangnya pendidikan wawasan kebangsaan sejak usia dini</p> <p>2. Wilayah Kabupaten Bengkulu yang terbuka terhadap pengaruh luar karena berada di jalur lintas baik secara nasional maupun internasional</p>	
	<p>Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global</p> <p>2. Munculnya potensi konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan wilayah perbatasan daerah, antar desa, dan kepemilikan lahan</p>	<p>1. Letak geografis Kabupaten Bengkulu yang berbatasan dengan Negara tetangga</p>	<p>1. Peran mitra Pemerintah bersama Orkemas yang meredam potensi-potensi konflik yang ada</p>



No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih (Terkait dengan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	<p>1. Belum mantapnya sistem politik secara nasional yang disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik</p> <p>2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun kedewasaan prilaku berdemokrasi</p>	<p>1. Jumlah partai politik yang masih banyak</p> <p>2. Sikap kurang senang atau tidak suka masyarakat akibat pengalaman dari kehidupan berpolitik</p>	1. Dana bantuan bagi partai politik 60 % nya digunakan untuk pendidikan politik

3.2.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian misi pertama, yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggungjawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak, Berani dan Ikhlas.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2016-2021, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesatuan Bangsa yang Kokoh dan Sistem Politik Demokratis yang kondusif di Kabupaten Bengkulu Selatan”

Penjelasan Visi, Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan yang kokoh, kondisi keamanan, ketertiban yang kondusif dan sistem Politik yang demokratis, dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 melalui Peningkatan pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, Meningkatkan Pembinaan kerukunan dan ketahanan, Meningkatkan pembinaan sistem Politik yang demokratis, agar terwujud pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila, wawasan kebangsaan serta terlaksananya sistem politik yang demokratis melalui terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan peran aktif masyarakat di bidang politik.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional

Penjelasan : Meningkatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, melalui sosialisasi revitalisasi nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara, falsafah Negara, kepribadian, pandangan hidup dan dasar pemersatu bangsa dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional guna memperkuat watak dan karakter masyarakat guna pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dan menumbuhkan



kembangkan nasionalisme, cinta tanah air Indonesia, persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta senantiasa waspada terhadap berbagai gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Meningkatkan situasi kondusif dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi

Penjelasan : Meningkatkan Pembinaan kerukunan dan ketahanan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menciptakan kondisi suasana yang kondusif aman, damai, sejuk, menangani potensi konflik yang timbul sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki ketahanan di bidang seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi melalui sosialisasi.

3. Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis

Penjelasan : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis dimaksudkan melalui sosialisasi peraturan perundangan Pemilu, koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, jujur, adil, bebas, rahasia, lancar , kondusif, aman, damai dan sejuk serta partisipasi aktif masyarakat



3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis terhadap sasaran Renstra Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau serta Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia / Dirjen Polpum dalam kewenangan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri/Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Mejadi POROS Jalanya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



2. Meningkatkan Pelayanan Publik

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada ditengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga Pemerintah dalam upaya penegakan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integritas Bangsa

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran Strategis dalam

Sedangkan Misi telah ditetapkan, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.



3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam meneyeleggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berohak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dijelaskan secara terperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dijelaskan pada Bagian ketiga Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 pada Pasal 8 ayat 1 (satu), bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Pada Pasal 9 didijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Disamping penyelenggaraan tugasnya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut sesuai bunyi Pasal 10 antara lain :

1. Perumusan kebijakan dibidang politik dalam negeridan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya serta fasilitasi penanganan konflik sosial.



7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bila dilihat visi misi Kementerian Dalam Negeri diatas, sangat berhubungan erat dengan visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis karena substansi visi dan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Suasana Yang Kondusif di Provinsi Riau. Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi, diarahkan untuk menumbuhkembangkan demokrasi yaitu perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai budaya lokal.
2. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif, merupakan satu upaya dalam melaksanakan pencegahan potensi konflik dan peningkatan pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan, diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan provinsi Riau, diarahkan untuk menggerakkan seluruh komponen dan elemen masyarakat baik LSM, Orkemas, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra Pemerintah dalam mensukseskan percepatan pembangunan di Provinsi Riau.



Adapun visi Provinsi Riau tahun 2020 (Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 36 Tahun 2001), yakni **“Terwujudnya provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bahtin, se Asia Tenggara Tahun 2020”**.

Untuk mendukung pemcapaian visi dan misinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menyusun 11 (sebelas) Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
7. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
8. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi
10. Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
11. Program Pengembangan Data/Inormasi

Bila dilihat dari uraian telaahan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau diatas, sangat jelas berhubungan erat dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, karena substansi visi dan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009.

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 777.393,02 Ha dan dibagi menjadi dibagi menjadi dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan Lindung seluas 226.240,74 Ha (31,12%) dan Kawasan budi daya seluas 551.152,28 Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional di Kabupaten Bengkalis terdiri dari kawasan lindung nasional dan kawasan andalan Duri – Dumai dan sekitarnya, sedangkan arahan struktur ruang nasional terdiri dari sistem perkotaan nasional dan sistem infrastruktur nasional.

Secara umum kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk :

1. Pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;
5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

Dari Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis tersebut diharapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis kedepan adalah *Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI*. Melalui kegiatan tersebut diharapkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat terlaksana dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan melihat berbagai permasalahan yang ada ditinjau dari beberapa aspek antara lain aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan/ketenteraman serta dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis selanjutnya melihat



peluang dan ancaman dari faktor eksternal SKPD dalam merealisasikan program dan kegiatan, masa waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis, ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang memberi peluang menguatnya politik aliran dalam kancah politik di daerah.
2. Masih belum optimalnya peran tokoh agama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam menangkal terjadinya konflik sosial.
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
4. Media sosial yang dapat memberikan dampak negatif bagi generasi muda sehingga mudah dipengaruhi paham radikalisme yang dapat menyebabkan semangat kebangsaan memudar.



Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang merupakan gambaran hasil akhir yang ingin dicapai. Melalui perumusan tujuan diharapkan akan lebih mudah untuk menyusun strategi atau program-program yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menetapkan **3 (tiga) Tujuan** yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021, yaitu :

- 1. Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;**
- 2. Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai ditengah masyarakat;**
- 3. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;**
- 4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.**

4.2 Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menjabarkan dalam **sasaran-sasaran strategis** yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra, yakni sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya cakupan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;**
- 2. Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS;**
- 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;**
- 4. Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.**

Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	1.1. Meningkatnya cakupan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	1. Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	600 Orang	600 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang	700 Orang
2.	Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai ditengah masyarakat	1.2. Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	1. Cakupan gangguan KAMTIBMAS	0	0	0	0	0	0
3.	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	2.1 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1. Cakupan pemilih	45%	-	50%	60%	65%	-
			2. Jumlah Orkemas yang dibina	20	30	40	40	50	50
4.	Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	3.1 Meningkatnya capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Nilai akuntabilitas	C	CC	B	BB	BB	BB
			2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KESATUAN BANGSA YANG KOKOH DAN SISTEM POLITIK DEMOKRATIS YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BENGKALIS			
MISI 1 : Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Strategi 1 : Meningkatkan pengetahuan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparatur melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi	Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan di Kabupaten Bengkulu Tengah
MISI : Meningkatkan situasi kondusif dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi			
Tujuan 1 : Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai ditengah masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Strategi 1 : Meningkatkan pembinaan kerukunan dan ketahanan nasional kepada kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan aparatur pemerintah melalui kegiatan rapat koordinasi, pendataan, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan : - Peraturan perundang-undangan tentang ORMAS	Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional di Kabupaten Bengkulu Tengah



		<ul style="list-style-type: none">- Pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme- Deteksi dini aparat pemerintah	
MISI : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis			
Tujuan 1 : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis	Sasaran 1 : Terwujudnya pembinaan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Bengkulu Selatan	Strategi 1 : Meningkatkan pembinaan sistem politik melalui kegiatan rapat koordinasi, bantuan keuangan kepada partai politik, pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pendidikan politik	Arah Kebijakan 1 : Meningkatkan pembinaan sistem politik yang demokratis di Kabupaten Bengkulu Selatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.



Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai masa RPJMD 2016-2021, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menetapkan indikator kinerja SKPD yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tabel ini diuraikan indikator kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkalis mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, yang menjelaskan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan SKPD sesuai kondisi kinerja pada awal periode RPJMD serta target capaian pada setiap tahun termasuk kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021.



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah penurunan potensi konflik	9	8	7	6	5	5	5	5
2	Jumlah LSM yang dibina	20	20	30	40	40	50	50	50
3	Jumlah lembaga non pemerintah yang dibina	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Tingkat partisipasi politik masyarakat	79%	79%	80%	83%	84%	85%	88%	88%



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 disusun sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Kesbang dan Politik dalam melaksanakan fungsi sebagai SKPD yang dikelompokkan menjalankan fungsi penunjang lainnya terkait tugas urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sistem dan mekanisme perencanaan yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis akan lebih terarah dan berkelanjutan serta akan lebih bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan sekaligus mendukung proses pencapaian akhir visi dan misi yang telah ditetapkan SKPD dan visi dan misi Kepala Daerah.

Selain itu dengan dirumuskannya Renstra ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya hingga berakhir periode RPJMD 2016-2021 dan diharapkan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi dan lingkungan baik itu internal maupun eksternal yang terjadi secara terus menerus dapat disikapi dengan arif dan bijaksana. Dengan perumusan Rencana Strategis, perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi, bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sangat tergantung pada partisipasi, semangat, sikap dan mental serta disiplin dari segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada level terendah. Untuk itu revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021 harus dijadikan acuan bagi personil yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan pada tahun 2021.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Tujuan 1 Melestarikan nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Sasaran 1 Meningkatnya cakupan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				285,206,700.00		310,019,800.00		176,637,800.00		120,229,400.00		2,669,640,700.00		3,150,000,000.00					
				1 Pembekalan Bagi Forum Komunikasi Umat Beragama	Jumlah anggota FKUB yang mendapatkan pembekalan	30 Orang	30 Orang	120,688,000.00	35 Orang	142,109,500.00	32 Orang	125,772,200.00	32 Orang	120,229,400.00	-	0.00	-	0.00			Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		
				2 Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Forum Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang medapatkan pemahaman sosialisasi tentang PBM	200 Orang	200 Orang	164,518,700.00	200 Orang	167,910,300.00	104 Orang	50,865,600.00	-	-	550 Orang	450,000,000.00	550 Orang	500,000,000.00			Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		
				3 Penyuluhan tentang revitalisasi aktualisasi dan nilai-nilai luhur dalam rangka pematapan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional NKRI	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman tentang arti penting ideologi Negara Kesatuan RI dalam aplikasi kehidupan sehari-hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 Orang	500,000,000.00	440 Orang	550,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		

					4	Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	400 Orang	250,000,000.00	400 Orang	300,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					5	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan pemahaman	-	-	-	-	-	-	-	-	550 Orang	500,000,000.00	550 Orang	500,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					6	Penyuluhan pencegahan dan peanggulangan bahaya terorisme	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pemahaman bahaya terorisme	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Orang	69,640,700.00	550 Orang	300,000,000.00			Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	
					7	Peningkatan kesadaran bela negara	Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan bela negara di kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	500 Orang	500,000,000.00	500 Orang	500,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					8	Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah	Jumlah aparat yang mendapatkan pelatihan deteksi dini sehingga mendapatkan informasi dini terjadinya potensi konflik di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	200,000,000.00	100 Orang	250,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					8	Sosialisasi gerakan nasionalisme revolusi mental	Jumlah aparat yang mendapatkan pelatihan deteksi dini sehingga mendapatkan informasi dini terjadinya potensi konflik di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	500 Orang	200,000,000.00	500 Orang	250,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
Tujuan 2	Sasaran 2																						

Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan damai ditengah masyarakat	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Cakupan gangguan KAMTIBMAS							1,371,379,900.00		780,499,100.00		462,307,850.00		317,534,200.00		1,455,000,000.00		1,630,000,000.00				
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan/ Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/Program Pendidikan Politik Masyarakat																		
					1 Penyuluhan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman pendidikan wawasan kebangsaan	200 Orang	200 Orang	188,976,000.00	300 Orang	146,876,600.00	50 Orang	77,475,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					2 Penyuluhan pencegahan dan peanggulangan bahaya terorisme	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pemahaman bahaya terorisme	160 Orang	190 Orang	199,698,100.00	190 Orang	176,585,500.00	160 Orang	102,513,600.00	135 Orang	70,859,200	-	-	-	-	-	-	-	
					3 Penyuluhan peningkatan kesadaran bela negara bagi aparaturnya pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	200 Orang	200 Orang	202,827,300.00	150 Orang	122,018,500.00	100 Orang	90,427,250.00	70 Orang	55,809,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
					4 Pembekalan bagi Forum Pembauran kebangsaan	Jumlah anggota FPK yang mendapatkan pembekalan	27 Orang	27 Orang	221,068,900.00	27 Orang	112,265,000.00	27 Orang	37,562,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
					5 Pendataan dan verifikasi dokumen Orkemas lingkup Pemkab Bengkalis	Jumlah verifikasi dokumen pendaftaran ormas	20 LSM	20 LSM	112,737,300.00	30 LSM	56,484,500.00	8 Dok	44,468,900.00	40 LSM	49,296,900.00	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakatan dan Ekonomi
					6 Sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang Orkemas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang orkemas	241 Orang	241 Orang	246,517,800.00	130 Orang	166,269,000.00	150 Orang	72,501,300.00	135 Orang	141,569,100.00	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakatan dan Ekonomi

					7	Diklat pembentukan kader bela Negara	Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan	80 Orang	80 Orang	199,554,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					8	Pemantauan tenaga kerja asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Jumlah tenaga kerja asing, orang asing dan organisasi asing yang terdata	-	-	-	-	-	2 Kec	37,358,900.00	-	-	-	-	-	-	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					9	Pemantauan orang asing dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	Persentase pemantauan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	120,000,000.00	1 Keg	130,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					10	Peningkatan efektifitas tugas Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan BAKORPAKEM	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	200,000,000.00	100 Orang	250,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					11	Pemantauan dan pemetaan potensi gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2012	Jumlah gangguan konflik sosial berdasarkan UU Nomor 7	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	250,000,000.00	11 Kecamatan	250,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					12	Peningkatan efektifitas tugas forum pembauran kebangsaan (FPK)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FPK	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	175,000,000.00	50 Orang	200,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					13	Rapat koordinasi tim terpadu daerah penanganan konflik sosial	Jumlah rapat koordinasi tim terpadu daerah penanganan konflik sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	180,000,000.00	11 Kecamatan	200,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					14	Peningkatan efektifitas tugas forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Jumlah FKUB yang mendapat pembekalan	-	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	150,000,000.00	50 Orang	200,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		
					15	Peningkatan efektifitas tugas FORKOPIMDA Kabupaten Bengkalis	Jumlah tim FORKOPIMDA yang mendapat pembekalan	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Orang	200,000,000.00	50 Orang	200,000,000.00	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas		

					16 Peningkatan efektifitas tugas forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	Jumlah rapat koordinasi dan laporan kegiatan FKDM	-	-	-	-	-	-	-	20 Orang	180,000,000.00	50 Orang	200,000,000.00			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)/ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan/Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				711,280,100.00	398,401,500.00	385,475,600.00	163,480,200.00			-		-				
					1 Pembekalan bagi kominda, dinas, instansi dan aparat	Jumlah anggota KOMINDA yang mendapatkan pembinaan	50 Orang	50 Orang	291,808,300.00	23 Orang	112,265,000.00	24 Orang	178,850,700.00	-	-	-	-	-			Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
					2 Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya terorisme	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyuluhan bahaya terorisme	160 Orang	160 Orang	199,698,100.00	190 Orang	176,585,500.00	160 Orang	102,513,600.00	135 Orang	70,859,200.00	-	-	-	-		Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi
					3 Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah anggota FKDM yang mendapatkan pembekalan	30 Orang	30 Orang	219,773,700.00	30 Orang	109,551,000.00	29 Orang	104,111,300.00	5 Orang	71,133,000.00	-	-	-	-		Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas
					4 Pembekalan bagi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi tim pembekalan bagi BAKORPAKEM	-	-	-	-	-	-	3 Kali	21,488,000.00	-	-	-	-		Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Wasnas	
Tujuan 3	Sasaran 3																				

						5 Sosialisasi Undang-Undang partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan pemahaman sosialisasi tentang undang-undang parpol	400 Orang	400 Orang	360,000,000.00	400 Orang	413,774,000.00	-	-	50 Orang	112,662,500.00	550 Orang	440,000,000.00	550 Orang	460,000,000.00			Bidang Politik		
						6 Sosialisasi bantuan partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol	-	-	-	50 Orang	158,042,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Bidang Politik	
						7 Monitoring Pemilu Gubernur Riau	Hasil perolehan suara Pemilu Gubernur Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	8 Kec	111,131,300.00	-	-	-	-	-	-	-			Bidang Politik	
						8 Sosialisasi kepada masyarakat pada Pemilu Gubernur Riau	Jumlah publikasi yang disediakan	-	-	-	-	-	456 Dok	251,037,400.00	-	-	-	-	-	-	-			Bidang Politik	
						9 Monitoring Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	Jumlah pelaksanaan Pemilu 2019 yang berjalan dengan baik dan lancar	-	-	-	-	-	-	-	11 Kec	231,862,000.00	-	-	-	-	-			Bidang Politik	
						10 Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden kepada masyarakat	Jumlah media cetak dan elektronik	-	-	-	-	-	-	-	25.305 Dok	383,101,500.00	-	-	-	-	-			Bidang Politik	
						11 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi UU Nomor 7	-	-	-	-	-	-	-	200 Orang	172,182,000.00	550 Orang	450,000,000.00	550 Orang	500,000,000.00			Bidang Politik		

						12 Sosialisasi undang-undang bantuan partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan sosialisasi undang-undang bantuan parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	177,000,000.00	50 Orang	200,000,000.00			Bidang Politik	
						13 Sosialisasi pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	650,000,000.00	-	-			Bidang Politik	
						14 Monitoring Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pelaksanaan Pemilu tahun 2020 yang berjalan dengan baik dan lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	250,000,000.00	-	-			Bidang Politik	
						15 Rapat koordinasi aparatur pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti delegrasi dan mengikuti rapat koordinasi dukungan aparatur pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	500,000,000.00	-	-			Bidang Politik	
						16 Sosialisasi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pemilih pemula tingkat setingkat SLTA yang mendapatkan pengetahuan tentang Pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	550 Orang	400,000,000.00	550 Orang	400,000,000.00			Bidang Politik	
						17 pemantauan situasi politik di Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemantauan situasi politik di Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	100,000,000.00	-	-			Bidang Politik	
						18 Sistem informasi Ormas	1. Jumlah aplikasi yang disediakan 2. Jumlah operator SIORMAS yang dipersiapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 1 Keg 2. 2 Orang	300,000,000.00	1. 1 Keg 2. 2 Orang	350,000,000.00			Bidang Politik	

					19 Sosialisasi pemilihan umum yang berbasis Jender	Jumlah pemilih jender yang mendapatkan pengetahuan tentang pemilu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	400,000,000.00			Bidang Politik	
					20 Sosialisasi Undang-Undang partai politik	Jumlah fungsionaris parpol yang mendapatkan pemahaman sosialisasi tentang undang-undang parpol	-	-	-	-	-	-	-	550 Orang	450,000,000.00	550 Orang	500,000,000.00			Bidang Politik	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,582,049,740.00		1,604,860,800.00		1,473,906,100.00		1,485,902,200.00		1,781,900,000.00				
Tujuan 4 Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Sasaran 4 Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai akuntabilitas			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dilayani setiap tahunnya 2. Jumlah jasa tenaga administrasi setiap tahunnya	1. 800 Surat 2. 2 orang	1. 800 Surat 2. 2 orang	49,990,000.00	1. 800 Surat 2. 2 orang	49,800,000.00	800 Surat	69,750,000.00	1. 800 Surat 2. 2 orang	36,150,000.00	1. 800 Surat 2. 5 orang	93,600,000.00	1. 800 Surat 2. 5 orang	95,000,000.00		Sekretariat BKBP
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti			2 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya	12 Bulan	12 Bulan	168,800,000.00	1.90% 2. 5 Orang	106,600,000.00	90%	101,920,000.00	12 Bulan	105,100,000.00	12 Bulan	130,000,000.00	12 Bulan	135,000,000.00		Sekretariat BKBP
					3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mengurus perizinannya	-	-	-	-	-	5 Unit	12,000,000.00	5 Unit	12,000,000.00	6 Unit	15,000,000.00	6 Unit	15,000,000.00		Sekretariat BKBP
					4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah peralatan dan alat pembersih kantor yang disediakan dalam satu tahun 2. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang disediakan dalam satu tahun	1. 22 Item 2. 7 Orang	1. 22 Item 2. 7 Orang	147,717,800.00	1. 22 Item 2. 7 Orang	149,108,700.00	1. 22 Item 2. 7 Orang	145,504,000.00	1. 19 Item 2. 8 Orang	166,600,000.00	1. 38 Item 2. 8 Orang	165,000,000.00	1. 38 Item 2. 8 Orang	170,000,000.00		Sekretariat BKBP

